

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan melakukan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:3). Realitas pelayanan publik yang kurang efisien menyebabkan pelayanan belum memenuhi kepentingan pengguna. Pelayanan publik yang baik harus menunjukkan peningkatan secara kuantitas dan kualitas. Pelayanan publik yang baik setidaknya mengacu kepada dua hal pokok yaitu memberikan kepuasan kepada publik dan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimum (Kementerian Keuangan, 2014:2), yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang pada akhirnya kepuasan masyarakat menjadi lebih baik.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diimplementasikan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan (perbaikan) seiring dengan reformasi manajemen keuangan pemerintahan untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket

peraturan peundang-undangan di bidang keuangan Negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satu dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran dan Belanja Daerah. Ruang lingkup Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi: Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan daerah; Pengeluaran daerah; Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang; Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Sehubungan dengan hal tersebut akan memberikan suatu dorongan untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan administrasi keuangan daerah khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, baik dari segi pengelolaan keuangan serta pendapatan daerah.

Pencairan dana merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebab tanpa proses tersebut tidak akan berdampak pada pembangunan perekonomian. Ketepatan waktu pencairan dana

sejalan dengan peningkatan akselerasi pembangunan dan perekonomian regional. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan pelayanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses pencairan dana ditenggarai menjadi salah satu penyebab permasalahan pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo; 2009). Permasalahan pencairan dana dalam APBD dapat terwujud ketidaktepatan waktu dan kesalahan dokumen SP2D. Salah satu isu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian permasalahan klasik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kementerian Keuangan, 2014:93). Menciptakan kualitas pencairan dana yang baik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu sistem yang digunakan.

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien (Wilkinson, 2000:8). Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue dalam Jumaili, 2005). Semakin cepatnya waktu untuk mengakses dan output sistem yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan *user* maka intensitas pemakaian sistem akan meningkat. Pemakaian yang berulang-ulang ini dapat dimaknai adanya sebuah kepuasan oleh *user*. Sering ditemukan bahwa teknologi yang

diterapkan dalam sistem informasi tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi kurang memberikan manfaat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam peningkatan kinerja. Kepuasan pengguna sistem informasi dapat dikatakan telah tercapai jika sistem informasi dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna sistem informasi dan mampu meningkatkan kinerja mereka secara optimal (DeLone, 2003). Kewajiban pemanfaatan sistem informasi oleh Pemerintah Daerah juga diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut :

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi pada perangkat daerah adalah direalisasikan alat bantu pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yaitu Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemerintah daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal terhadap Bendahara Umum Daerah (BUD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, sistem Informasi yang digunakan sebagai input utama dalam proses penerbitan SP2D ternyata sesuai dengan kenyataan belum semua memenuhi harapan terhadap tepat waktunya penerbitan SP2D itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan Sistem Informasi terhadap penerbitan SP2D khususnya tentang pemahaman pegawai, faktor-faktor pendukung penerapan sistem serta kualitas SP2D yang dihasilkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng maka peneliti mengangkat judul sebagai berikut: **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, yang menjadi pokok permasalahan dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Analisis Penerapan Sistem Informasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi beberapa aspek analisis yaitu langkah-langkah penerapan, faktor pendukung sistem, luaran yang dihasilkan, serta solusi dan kendala yang dilakukan.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi terhadap penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi beberapa aspek analisis yaitu langkah-langkah penerapan, faktor pendukung sistem, luaran yang dihasilkan, serta solusi dan kendala yang dilakukan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori yang diperoleh pada bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja dan dapat memperoleh tambahan pengetahuan khususnya mengenai penerapan sistem informasi terhadap penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Mahasiswa juga dapat membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapat serta lebih dapat memahami dunia kerja secara nyata.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam melakukan penelitian serupa selanjutnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Serta diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan

sebagai acuan bagi Universitas Pendidikan Ganesha sebagai media untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan dapat menyesuaikan (memperbaharui) kurikulum.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Serta diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk menjalin kerja sama baik antara pihak instansi dengan lembaga pendidikan.

